KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

U1EMKWB9

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

\ <u>\</u> KEMENTERI	AN KEUANGAN RI	H.1 NOM	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 3 6 9				H.4 X Final	
DIREKTORAT	JENDERAL PAJAK	H.2 X	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 68 807 575 3 722 000								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : SAPARIAH								
3. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJA (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	4 21-402-01		574.000	574.00	0 0	5	28.700	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota								
Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 037/SP2D-LS/BLUD-RSJDAHM/IV/2022								
Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
Nomor: Tanggal dd mmyyyy								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK								
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0								
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR								
C.3 ID Subunit O	rganisasi :							
C.4 Tanggal : 1 3 dd 0 4 mm 2				2 0 2 2 <i>yyyy</i>				
C.5 Nama Penandatangan : HARI JUMADI								
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.							ı benar dan telah saya	
				g berlaku, Direktorat Jenderal Pa lukan tanda tangan.	ajak mengatur bahwa	dokumen ini tel	lah ditandatangani secara	